

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih merupakan masalah yang dialami seluruh penjuru dunia. Masalah kemiskinan sendiri tidak hanya melibatkan negara-negara dunia ketiga maupun negara-negara berkembang. Hal ini karena disamping istilah kemiskinan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membiayai hidupnya atau mencukupi hidupnya secara layak namun juga berkaitan dengan adanya ketimpangan diantara penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan penduduk yang berpenghasilan rendah (Hudiyanto, 2014).

Kemiskinan disamping ketimpangan dan pengangguran merupakan masalah klasik yang besar dan mendasar bagi sebagian besar negara sedang berkembang termasuk di negara Indonesia sendiri. Berbagai macam indikator dan parameter untuk mengukur tingkat kemiskinan dan menghitung jumlah penduduk miskin telah lama diformulasikan dan dikembangkan para pakar dalam bidang ilmu ekonomi dan sosial lainnya (Hudaya, 2009).

Masalah kemiskinan adalah sebuah permasalahan sosial yang cukup kompleks dan harus segera ditangani dengan cepat agar dapat terselesaikan. Indonesia sebagai negara berkembang serta memiliki jumlah penduduk yang besar tidak dapat terhindar dari permasalahan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa jumlah penduduk miskin yang besar serta sebagian besar masih tinggal

di daerah pedesaan yang sulit untuk diakses dan bahkan di daerah perkotaan seperti halnya di provinsi Jawa Tengah pun juga sangat banyak ditemukan masyarakat miskin.

Sebagai pusat pemerintahan Indonesia, pulau Jawa merupakan wilayah yang selama ini pembangunannya relatif lebih cepat dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Dibalik pembangunan yang cepat tersebut, tingkat kemiskinan di Pulau Jawa juga lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya (Ardianto, 2016). Berdasarkan data BPS dan dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa pada tahun 2015 sebesar 15.312.300 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28.592.790 jiwa sehingga penduduk miskin terkonsentrasi berada di Pulau Jawa.

Untuk mewujudkan tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan umum, berbagai kegiatan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus. Salah satunya adalah dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional. Indikator utama keberhasilan pembangunan nasional salah satunya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah (Jundi, 2014).

Dapat dilihat dari tabel 1.1 jumlah penduduk miskin di seluruh provinsi dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi kedua di Pulau Jawa pada jumlah penduduk miskin tahun 2014 maupun tahun 2015 yaitu sebesar 4.577.040 ribu orang tahun 2014 dan 4.505.780 ribu orang tahun 2015. Dalam presentase pada tahun 2015 Jawa Tengah menduduki posisi pertama yaitu sebesar 13,32 persen dibandingkan tahun 2014 walaupun lebih besar angka presentasinya yaitu 13,58 persen namun menduduki posisi kedua setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan walaupun terjadi penurunan, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong tinggi. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tersebut bahkan melebihi angka kemiskinan secara nasional yang hanya mencapai 11,13 persen.

Tabel 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Indonesia
Tahun 2014 - 2015

No	Provinsi	2014		2015	
		September	Presentase	September	Presentase
1	Aceh	837.420	16,98	859.410	17,11
2	Sumatera Utara	1.360.600	9,85	1.508.140	10,79
3	Sumatera Barat	354.740	6,89	349.530	6,71
4	Riau	498.280	7,99	562.920	8,82
5	Jambi	281.750	8,39	311.570	9,12
6	Sumatera Selatan	1.085.800	13,62	1.112.530	13,77
7	Bengkulu	316.500	17,09	322.830	17,16
8	Lampung	1.143.940	14,21	1.100.680	13,53
9	Kep. Bangka Belitung	67.230	4,97	66.620	4,83
10	Kepulauan Riau	124.170	6,40	114.840	5,78
11	DKI Jakarta	412.790	4,09	368.670	3,61

Lanjutan Tabel 1.1 Jumlah Dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2014 - 2015

No	Provinsi	2014		2015	
		September	Presentase	September	Presentase
12	Jawa Barat	4.238.960	9,18	4.485.660	9,57
13	Jawa Tengah	4.561.820	13,58	4.505.780	13,32
14	DI Yogyakarta	532.580	14,55	485.560	13,16
15	Jawa Timur	4.748.420	12,28	4.775.970	12,28
16	Banten	649.190	5,51	690.660	5,75
17	Bali	195.560	4,76	218.790	5,25
18	Nusa Tenggara Barat	816.620	17,05	802.290	16,54
19	Nusa Tenggara Timur	991.880	19,60	1.160.530	22,58
20	Kalimantan Barat	381.910	8,07	405.510	8,44
21	Kalimantan Tengah	148.820	6,07	148.130	5,91
22	Kalimantan Selatan	189.490	4,81	189.160	4,72
23	Kalimantan Timur	252.680	6,31	209.980	6,10
24	Kalimantan Utara	-	-	40.930	6,32
25	Sulawesi Utara	197.560	8,26	217.140	8,98
26	Sulawesi Tengah	387.060	13,61	406.340	14,07
27	Sulawesi Selatan	806.350	9,54	864.520	10,12
28	Sulawesi Tenggara	314.090	12,77	345.020	13,74
29	Gorontalo	195.100	17,41	206.520	18,16
30	Sulawesi Barat	154.690	12,05	153.210	11,90
31	Maluku	307.020	18,44	327.770	19,36
32	Maluku Utara	84.790	7,41	72.640	6,22
33	Papua Barat	225.460	26,26	225.540	25,73
34	Papua	864.110	27,80	898.210	28,40
	Indonesia	27.727.780	10,96	28.513.600	11,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Maka dari itu dapat dikatakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tidak bisa dikatakan berhasil tetapi juga belum sepenuhnya berhasil. Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menekan pemerintah lebih memberikan perhatiannya terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Guna menurunkan tingkat kemiskinan diperlukan cara mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat

dirumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah khususnya bagi setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang dan program nasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan antara lain pendidikan, tingkat pengangguran, upah minimum serta pendidikan.

Kualitas sumber daya manusia itu sendiri dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari segi fisik maupun non fisik. Fisik disini adalah peningkatan kualitas fisik tersebut melalui program kesehatan dan gizi dimana keberhasilan program tersebut akan mempengaruhi angka harapan hidup manusia karena semakin baik gizi atau semakin sehat maka semakin lama usia manusia sedangkan non fisik melalui pendidikan dimana untuk pengembangan sumber daya manusia itu sendiri semakin tinggi atau lama pendidikan yang ditempuh maka akan semakin tinggi peluang untuk mendapat pekerjaan yang bagus. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, karena semakin tinggi tingkat kesehatan dan pendidikan seorang individu maka akan produktivitas individu tersebut meningkat, karena produktivitas meningkat, mereka bekerja, dan bekerja itu lah cara untuk memperoleh pendapatan sebagai pencukup kebutuhan hidupnya, karena dapat mencukupi kebutuhan ini lah, mereka dapat terhindar dari lingkaran kemiskinan.

Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan menyebabkan cepatnya laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja, atau semakin produktifnya tenaga kerja namun kemampuan negara sedang berkembang dalam meningkatkan kesempatan kerja baru sangatlah terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat yang dapat menekan angka kemiskinan.

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2015) merupakan kondisi dimana seorang individu atau sekelompok orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut Jundi (2014) bahwa pengukuran tingkat kemiskinan yang ada di setiap negara cenderung berbeda dikarenakan standar hidup layak serta kondisi sosial ekonomi yang juga berbeda.

Pengangguran terjadi karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang lambat dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terlalu cepat atau ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja terhadap permintaan tenaga kerja atau jumlah lapangan kerja yang tersedia. Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu bentuk nyata kurang berhasilnya pembangunan dalam suatu negara.

Pengangguran sendiri sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Menurut data BPS bahwa tingkat pengangguran di Jawa Tengah

cenderung naik turun atau berfluktuasi pada setiap tahunnya yaitu tahun 2011 – 2015 sebesar 6.01 persen pada tahun 2013, cenderung meningkat daripada tahun sebelumnya tahun 2012 yakni sebesar 5,61 persen dan menurun lagi pada tahun 2014 menjadi 5,68 persen. Tidak hanya jumlah penduduk dan pengangguran saja yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat kemiskinan yakni Upah Minimum adalah standar yang digunakan untuk memberikan upah kepada karyawan, pegawai atau buruh dalam lingkungan kerja. Upah sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, jika seorang pekerja tidak memperoleh upah yang cukup maka tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Maka diperlukan adanya penetapan upah minimum oleh pemerintah dengan disesuaikan oleh kondisi perekonomian yang ada di daerah tersebut maka setiap daerah berbeda-beda dalam penetapan upah minimum.

Menurut data BPS bahwa upah minimum mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni pada tahun 2011 upah minimum Jawa Tengah sebesar Rp 795.000 tahun 2012 sebesar Rp 914.275 tahun 2013 sebesar Rp 1.066.603,43 tahun 2014 sebesar dan di tahun 2015 sebesar. kondisi ini menggambarkan bahwa tahun ke tahun, kesejahteraan pekerja mengalami peningkatan karena penetapan upah minimum oleh pemerintah yang menyesuaikan kondisi pada tahun-tahun tersebut.

Tingkat pendidikan bergerak secara fluktuatif pada tahun 2011 – 2015. Pada tahun 2011 dan 2012 rata-rata lama sekolah penduduk adalah

sebesar 7,39 sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan sebesar 0,46 poin yaitu hanya sebesar 6,93 tahun lalu meningkat sebanyak 0,10 poin yaitu 7,03 pada tahun 2015.

Dalam penelitian ini dikarenakan masih tingginya tingkat kemiskinan bahkan melebihi angka kemiskinan nasional menjadi masalah yang akan diteliti oleh penulis dimana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti pendidikan, tingkat pengangguran, upah minimum serta kesehatan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015)*”.

B. Pembatasan Penelitian

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan dan lebih fokus dan terarah pada tujuan semula, maka penulis membatasi permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dengan menganalisis pengaruh pendidikan, tingkat pengangguran, upah minimum dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dimana lingkup penelitian ini berada di 35 kabupaten/kota yaitu 29 kabupaten dan 6 kota. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan periode waktu data yang digunakan adalah dari tahun 2011 – 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

4. Untuk mengetahui pengaruh Kesehatan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Secara khusus, penelitian ini adalah kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan ataupun teori-teori yang sudah dipelajari penulis yang diperoleh selama menempuh bangku perkuliahan program S1 jurusan Ilmu Ekonomi.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini guna menambah wawasan kepada para akademisi tentang faktor yang mempengaruhi serta perbedaaan tingkat kemiskinan di bebagai kabupaten di Provinsi Jawa Tengah serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjurnya dengan bidang yang sama namun ruang lingkup yang berbeda sehingga mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini.

3. Bagi Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi yang berguna dalam mendalami faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu atau faktor yang dominan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.